

POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024

Ratna Istianah^a, Saehudin^b

^aKomisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

^bPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Indonesia

E-mail: ratnaistianah@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku politik kiai menjelang Pemilu 2024 di kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh identitas calon yang akan dipilih. Identitas calon menjadi pertimbangan utama bagi para kiai untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah tersebut, maka digunakan perpaduan dua dimensi penting, yakni pendekatan perilaku pemilih (*voter behavior*) dan politik identitas agama yang sama dalam perspektif sosiologi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Lokasi penelitian di kota Sukabumi dengan fokus pada politik identitas dan perilaku politik kiai menjelang pemilihan umum 2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku politik kiai di Sukabumi dipengaruhi oleh identitas calon peserta Pemilu dan berkontribusi positif dalam membentuk perilaku politik kiai pada Pemilu di Sukabumi. Tokoh agama dalam mengekspresikan perilaku politiknya lebih didasarkan pada identitas agama dan keyakinan yang sama daripada faktor kekerabatan dan kedaerahan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam memetakan perkembangan perilaku dan partisipasi politik tokoh agama khususnya kiai di Sukabumi.

Kata Kunci: Politik identitas, Perilaku politik, Tokoh agama, Pemilu 2024

IDENTITY POLITICS AND POLITICAL BEHAVIOR OF CHAPLAIN IN THE CITY OF SUKABUMI AHEAD OF THE 2024 GENERAL ELECTIONS

ABSTRACT

The kiai's political behavior ahead of the 2024 elections in the city of Sukabumi is strongly influenced by the identity of the candidate to be elected. Candidate identity is the main consideration for kiai in determining their choice. As for getting a better understanding of the problem, a combination of two important dimensions is used, namely the voter behavior approach and the same religious identity politics from the perspective of political sociology. The research uses a mix method through questionnaires distributed to respondents. The research location is in Sukabumi with a focus on identity politics and the political behavior of the kiai ahead of the 2024 general election. The results of the study conclude that the political behavior of the kiai in Sukabumi is influenced by the identity politics and contributes positively to shaping the political behavior of the kiai in elections in Sukabumi. Religious figures in expressing their political behavior are based more on religious identity and the same beliefs than kinship and regional factors. The results of this study are expected to be a reference in mapping the development of the behavior and political participation of religious leaders, especially the kiai in Sukabumi.

Keywords: Identity politics, Political behavior, Religious leaders, 2024 Election

PENDAHULUAN

Demokrasi membutuhkan pemilihan umum untuk berjalan dengan baik. Artinya, pemerintah dan masyarakat yang terlibat di dalamnya saling mendengarkan dan bekerja sama untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai rencana. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam urusan politik, menunjukkan semakin besar kemungkinan bahwa pemerintah diakui secara sah dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini karena rakyat sendiri yang menentukan siapa yang dipilih, dan mereka dapat menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi masa depan pemerintahan mereka. Selain itu, memberikan suara dalam Pemilu adalah cara bagi orang untuk mengevaluasi pemerintah dan memastikan bahwa itu bekerja untuk kepentingan rakyat. Hasil Pemilu adalah cara untuk mengetahui seberapa besar legitimasi pemerintah, dan membantu menentukan arah masa depan negara. Demokrasi memercayakan pemilihan umum untuk membiarkan orang-orang memiliki hak suara dalam menjalankan negara mereka.

Pasca reformasi, masyarakat Indonesia menggunakan politik identitas untuk membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku publik, dan mengucilkan kelompok orang tertentu. Hal ini menimbulkan dinamika politik yang sering diwarnai dengan maraknya penggunaan politik kekuasaan (Maarif, 2010: 64 dan Rifan, 2020, 1738: 173). Penggunaan politik identitas di Indonesia semakin marak dalam beberapa tahun terakhir menjelang Pemilu. Ini melibatkan orang-orang yang mencoba mendefinisikan diri mereka sendiri dan kelompok mereka sendiri dengan cara yang menarik bagi mereka, daripada memandang seluruh negara atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terlihat paling jelas dalam kampanye pemilihan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada tahun 2014, dan terjadi lagi dalam kampanye pemilihan presiden tahun ini (Rifan, 2020: 1738).

Menurut Agnes Heller yang dikutip (Rahman, 2020), politik identitas merupakan konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya terletak pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Pada setiap komunitas, walaupun mereka memiliki ideologi dan mempunyai tujuan kolektif, tidak bisa dipungkiri akan ada individu yang berbeda identitasnya.

Pada dasarnya suatu identitas mengarah pada sifat egois dan memaksakan kehendak untuk mengusahakan pemecahan saat disandingkan pada kepentingan-kepentingan politik. Sehingga pada proses pemecahan tersebut akan menggabungkan identitas individu yang mempunyai kesamaan baik secara agama, suku atau ras.

Politik identitas merupakan cara berpikir yang difokuskan pada cara-cara berbeda yang mengidentifikasi orang dengan kelompok yang berbeda. Ini dapat mencakup hal-hal seperti etnis, agama, atau kebangsaan. Hal demikian menjadi semakin penting dalam pemilihan presiden 2019 karena mempengaruhi keputusan yang diambil pemilih. (Rifan, 2020: 1739).

Politik identitas adalah praktik menggunakan identitas anda sendiri sebagai cara untuk membela hak-hak orang lain yang memiliki identitas yang sama. Ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki kepentingan khusus untuk melindungi komunitasnya sendiri, dan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama untuk mendukung kepentingan orang-orang dengan identitas yang sama. Secara teoritis, inilah yang seharusnya dilakukan oleh politik identitas menekankan kesamaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menciptakan gerakan yang lebih kuat dan bersatu. Namun dalam prakteknya, ini adalah cara untuk terus memperjuangkan hak-hak orang yang sudah memiliki banyak kekuasaan. (Buchari, 2014: 20).

Politik identitas merupakan suatu sistem untuk mengerahkan massa dengan memanfaatkan identitas sebagai daya tarik individu-individu demi mencapai tujuan atau kepentingan anggota kelompoknya. Otomatisasi dari identitas dapat menarik setiap individu yang memiliki kesamaan dari agama, suku dan budaya lainnya. Perasaan etnosentrisme kelompok semakin menjadi, dimana kelompok masyarakat yang sudah terorganisir akan merasa dirinya paling baik dari kelompok di luar dari pada dirinya. Keadaan tersebut akan menggulung seperti bola salju hingga membesar (Rahman, 2020: 7).

Identitas politik dalam bingkai sosiologis maupun politik biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu identitas sosial (Agama, Etnis, Ras, Kelas dan Gender). Sedangkan pada bingkai politik, identitas sosial tersebut menentukan subjek dalam relasi sosialnya. Identitas sering digiring oleh keadaan politik dan menjadi politik identitas sebagai suatu cara untuk mengambil alih kekuasaan melalui identitas sebagai penarik massa.

Identitas politik adalah cara kita mengidentifikasi dengan sekelompok orang dan hal-hal yang kita pedulikan. Identitas sosial adalah cara kita memandang diri sendiri dan orang lain di dunia. Bersama-sama, kedua hal ini memperkuat politik kita. Terkhusus di Kota Sukabumi politik identitas lebih pekat pada masalah-masalah agama, ideologi dan keyakinan para elite yang memiliki artikulasi masing-masing. Dewasa ini, tak jarang setiap gerakan massa selalu dipenuhi oleh simbol-simbol keagamaan tertentu. Sentimen keagamaan mudah untuk disentuh sehingga reaksi akan tanggapan massanya cepat dalam setiap bentuk keadaan di ranah politik. Di era politik kontemporer ini, politik identitas bisa menjadi ancaman bagi sikap nasionalisme bangsa dan keutuhan negara. Politisasi agama sebagai identitas yang memiliki kekuatan penarik massa telah menjadi fenomena dan fakta yang sebetulnya sudah terjadi dari sebelum adanya Pemilu di Indonesia sehingga menjadi lumrah di masyarakat.

Politik identitas juga mencuat sangat kuat terutama saat Pemilu Tahun 2019. Pada saat itu, sejumlah organisasi keagamaan mengkampanyekan calon-calon yang dianggap memihak terhadap umat Islam dan menolak

calon yang dianggap sebagai musuh umat Islam. Penyebaran informasi yang massif juga mempengaruhi para tokoh agama Islam di Kota Sukabumi. Banyak dari para tokoh agama yang mengorientasikan pilihan politiknya pada calon yang memiliki agama dan keyakinan yang sama serta calon yang mereka anggap sebagai representasi umat Islam. Agama adalah salah satu bagian sentral dari identitas seseorang. Menjadi penganut suatu agama sering kali berarti lebih dari sekadar berbagi keyakinan dan berpartisipasi dalam ritualnya; itu juga berarti menjadi bagian dari suatu komunitas dan terkadang suatu budaya (Rachman, 2020).

Sedangkan perilaku pemilih di Kota Sukabumi lebih cenderung kepada perilaku pemilih agamis. Perilaku agamis adalah pemilih yang menjadikan agama dan penilaian spiritual sebagai dasar pilihan. Perilaku ini merupakan bagian dari perilaku yang terkategori pemilih sosiologis dengan faktor utama penelitiannya yaitu agama (Istianah, 2022: 126). Perilaku ini menilai bahwa agama seorang calon/kandidat adalah dasar utama dalam menentukan pilihan politiknya.

Perilaku pemilih atau respon masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat proses Pemilu maupun Pemilihan tidak terlepas dari emosional dan psikologis yang diimplementasikan dalam bentuk tindakan politik seperti memberikan dukungan kepada calon atau suatu partai tertentu dengan mengikuti proses pemberian suara pada saat Pemilu nanti. Penelitian dan kajian terhadap perilaku pemilih sering menjadi fokus penelitian karena dapat mengetahui jangkauan kepemiluan dari suatu kelompok politik tertentu. Dalam sistem demokrasi dan proporsional terbuka mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan penentu kemenangan calon politik pada saat proses Pemilu berlangsung. (Irawan dkk. 2022: 107).

Pada saat pemilihan, pemilih dapat menjadikan seseorang untuk terpilih menjadi anggota Legislatif, Walikota, Gubernur, dan bahkan Presiden. Perilaku pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh sosio kultural masyarakat di wilayah Sukabumi khususnya.

Perilaku pemilih dipengaruhi oleh banyak faktor, ia tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan aspek lain. Misalnya, faktor isu-isu dan kebijakan politik, faktor agama, adanya sekelompok orang yang memilih kandidat tertentu karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya. Selain itu, ada juga orang yang memilih kandidat tertentu karena dianggap mewakili kelas sosialnya. Bahkan ada juga kelompok yang memilih kandidat tertentu sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu (Hemay & Munandar, 2015).

Lantas bagaimana dengan perilaku politik kiai di Pemilihan Umum Tahun 2024?. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis politik identitas dan perilaku politik kiai di tahun 2019 dan mencoba mengaitkan dengan sikap dan perilaku kiai di tahun

2024. Menjelang Pemilu Tahun 2024, apakah politik identitas dan perilaku kiai di Kota Sukabumi masih sama dengan Tahun 2019 atau bahkan mungkin sudah mengalami pergeseran paradigma politik.

Ada banyak orang yang telah mempelajari politik identitas sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hemay & Munandar (2015). Risetnya berfokus pada bagaimana masyarakat memilih dalam Pemilu, khususnya Pilkada Bengkulu Tahun 2015. Risetnya menemukan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih berdasarkan identitas etnis dan citra calon gubernur. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rif'an (2020), Peneliti menemukan bahwa politik identitas berbasis agama digunakan oleh pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno secara sistematis dan terstruktur dalam Pilkada 2019 di Kota Palembang. Ini termasuk menggunakan simbol-simbol agama dan ayat-ayat Al Quran dan Hadits dalam pidato dan kampanye propaganda untuk membangun dukungan publik bagi kandidat mereka. Rif'an berpendapat bahwa hal ini berdampak signifikan terhadap perilaku pemilih di kota, terutama di kalangan menengah atas dan bawah.

Dua penelitian yang sudah disebutkan memperlihatkan bahwa politik identitas dari calon maupun identitas yang dibangun oleh para pendukung calon telah mempengaruhi perilaku pemilih. Meskipun demikian, penelitian yang langsung fokus pada kiai sebagai pemuka agama dan perilaku politiknya menjelang pemilihan umum untuk tahun 2024 belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui perilaku politik kiai apakah sejalan dengan politik identitas, mengapa perilaku politik kiai dikategorikan menggambarkan politik identitas dan seberapa besar peran politik identitas terhadap perilaku politik kiai jelang Pemilu Tahun 2024. Dengan mengetahui kemungkinan tersebut, maka semua komponen bisa menahan diri dan mengurangi politik identitas dalam pesta demokrasi tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method research*) yaitu metode penelitian yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Data yang digunakan berupa penggabungan data-data yang diperoleh melalui kualitatif dan kuantitatif, yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. (Yaumi, 2014: 99)

Adapun definisi metode campuran menurut John W. Creswell (dalam Cherlinda, 2019:43) adalah cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber kualitatif dan kuantitatif. Metode ini menggunakan asumsi-asumsi filosofis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif kemudian dilakukan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Metode ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan

menganalisis dua jenis data, ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Fokus penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut Whitney (dalam Istianah, 2022:51). Metode deskriptif terdiri dari mencari tahu fakta masalah-masalah dalam masyarakat dan cara kerjanya dengan mempelajari situasi-situasi tertentu. Penelitian ini dapat membantu kita memahami hubungan, aktivitas, sikap, dan pandangan, bahkan proses yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (*mixed method research*) mengkaji tentang politik identitas dan perilaku politik kiai di Kota Sukabumi menjelang Pemilihan Umum 2024.

Populasi pada penelitian ini adalah para kiai pimpinan ormas Islam ataupun yang memiliki pesantren dan pengajian aktif di Kota Sukabumi yaitu sebanyak 95 orang sesuai data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi. Sehubungan dengan ukuran populasi tidak terlalu besar, maka penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel, Sugiyono (2016:67) menyatakan, "Sampling total adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel." Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, atau penelitian yang membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 sampel.

Data yang dikumpulkan dalam riset ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disimpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Kuesioner yaitu suatu pedoman pertanyaan yang dilakukan dengan pengisian secara terinci berupa pertanyaan yang terstruktur yang meliputi semua pendekatan perilaku. Pertanyaan dalam Kuesioner yang digunakan dalam riset ini adalah pertanyaan secara tertutup dengan jawaban yang menggunakan Skala Guttman. Adapun data sekunder ditujukan untuk memperoleh gambaran umum serta untuk mendukung data penelitian. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen data kiai di Kota Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai politik identitas dan perilaku politik kiai di Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan menggunakan metode *survey* dan wawancara terhadap responden serta diperkuat dengan hasil studi literasi dari beberapa sumber referensi yang ada. Responden terdiri dari para kiai yang memiliki pesantren ataupun jamaah di wilayah Kota Sukabumi. Survey ini juga dibuat dalam bentuk kuesioner yang dijawab secara langsung oleh responden.

Pengaruh politik identitas terhadap perilaku politik kiai dapat diketahui dengan cara menggunakan pengukuran politik identitas dengan indikator

yang dikemukakan oleh Surbakti (dalam Istianah, 2022:41) yaitu identitas sakral (agama), primordial (kekerabatan dan kedaerahan). Sedangkan untuk mengetahui perilaku politik kiai menggunakan pendekatan ilmu politik *behavior* (perilaku pemilih) menurut Affan Gaffar yang dikutip oleh Asfar (dalam Istianah, 2022:30) dianalisis berdasarkan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan) dan Rasional (Mazhab Virginia).

Penelitian tentang perilaku pemilih bukanlah hal yang baru yang dilakukan oleh para peneliti. Berdasarkan pada kajian teori dan hasil wawancara, penulis berhasil mengetahui perilaku politik kiai di Kota Sukabumi menjelang pemilihan Umum Tahun 2024. Perilaku memilih adalah bagaimana seseorang memilih apa yang menurutnya merupakan pilihan terbaik. Ada tiga cara berpikir utama tentang perilaku pemilih yaitu sosiologis, psikologis, dan rasional kesemuanya itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa perilaku pemilih kiai di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh ketiga pendekatan tersebut.

Pengaruh Identitas Agama terhadap Perilaku Politik Kiai

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara identitas agama terhadap perilaku politik kiai, yang dibuktikan dengan hasil olah data statistik identitas agama didapatkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,595 > 1,98525$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya identitas agama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku politik kiai di Kota Sukabumi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadil Ainur Rif'an (2020) dengan judul Politik Identitas dan Perilaku Pemilih Pada Pilpres di Kota Palembang Sumatera Selatan : Studi Kasus di Tiga Kelurahan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa politik identitas sangat berpengaruh terhadap mobilisasi suara dan perilaku pemilih pada Pilpres 2019 di Kota Palembang.

Peran kiai dalam politik memang selalu menarik untuk dibahas karena kiai memiliki wajah berbeda yang mencerminkan kompleksitas pandangan kiai terhadap politik, misalnya, kiai dapat terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau warna tersendiri bagi politik di tingkat daerah. Selain itu, kemampuan kiai dalam menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peranannya sangat menentukan dalam mewujudkan masyarakat yang partisipatif juga penting. Sebab, hubungan yang sangat erat antara kiai dan santri merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, hubungan santri dan kiai tidak hanya sebatas di dunia pesantren.

Kiai adalah simbol agama dan berdampak besar bagi bangsa karena dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Hal ini penting karena dapat membantu melawan politik identitas (politik yang menggunakan isu agama) dalam pemilu yang seringkali diwarnai dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Sebagian orang berpendapat bahwa keterlibatan kiai dalam politik dapat memberikan efek positif bagi masyarakat karena memungkinkan orang untuk berbagi ide dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun ada pula yang berpendapat bahwa aktivitas politik kiai harus dibatasi karena dapat menimbulkan konflik dan perpecahan (Rijal, 2014).

Ada hubungan yang kuat antara agama dan politik, masyarakat sering bertindak dengan cara yang dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka. Misalnya, orang yang mengaku beragama cenderung lebih aktif secara politik daripada mereka yang tidak. Para kiai di Kota Sukabumi cenderung menjadikan kesamaan agama yang dipeluk menjadi faktor sakral dalam membentuk identitas. Hasil ini ditemukan dengan menjalankan uji regresi sederhana pada sampel 95 orang. Korelasi antara agama dan perilaku politik adalah 0,812, dan R square adalah 0,666, yang berarti bahwa 66,6% pengaruh terhadap perilaku politik kiai dapat dikaitkan dengan identitas agama, yaitu memberikan pengakuan dan dukungan kepada calon presiden dan caleg berdasarkan agama yang sama, memiliki kepribadian yang sholeh dan mempunyai pemahaman agama/keyakinan yang sama.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara identitas keagamaan (X1) dengan perilaku politik (Y) yaitu sebesar 66,6%. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan responden yang menilai bahwa agama seorang kandidat adalah dasar utama dalam menentukan pilihan politiknya. Perilaku politik kiai seperti ini nampak tergambar pada salah seorang responden bernama Kiai Haji Fathullah Manshur, Lc (Abah Fatah) pemilik pesantren Ibadurrahman, menurutnya:

pemimpin yang kita pilih tentunya harus punya keyakinan agama yang sama, agar kepemimpinan pemimpin kita nantinya sesuai di tuntunan Rasulullah SAW, apalagi Kota Sukabumi mayoritas beragama Islam.

Beberapa responden lainnya juga seperti K.H Abdul Manan (Pimpinan Pesantren Al Islamiyah) dan Ustad Yusuf Gunawan (Pimpinan Yayasan Al-Ma'had) menyatakan bahwa identitas agama sangat mempengaruhi pilihan politiknya. Hal ini senada dengan pernyataan dari K.H. Ade Rahmatullah (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi), menurutnya pemimpin yang seiman akan membawa pada kebaikan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Karakteristik pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi adalah hal yang harus dimiliki oleh calon pemimpin terutama di sebuah kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Mereka juga berharap calon pemimpin yang akan menjadi pilihan masyarakat kelak, tidak hanya sekedar programnya saja yang dilihat tapi juga perlu diperhatikan bagaimana cara ibadahnya. Jika ibadahnya bagus maka akan bagus juga ke yang lainnya. Pendapat yang lainnya seperti yang diungkapkan oleh responden di atas juga diutarakan oleh responden lainnya yaitu pendapat K.H Aab Abdullah (Ketua MUI Kota Sukabumi). Beberapa pendapat dari responden di atas memberikan gambaran terhadap perilaku pemilih dengan kategori agamis yang menjadi perilaku pemilih di Kota Sukabumi.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh para kiai yang diwawancarai oleh peneliti, seperti K.H Abah Fatah, K.H Aab Abdullah, K.H. Ade Rahmatullah, K.H. Abdul Manan dan Ustad Yusuf Gunawan semakin meyakinkan bahwa faktor agama dan keyakinan yang sama menjadi faktor utama perilaku politik kiai di kota Sukabumi dalam menentukan pilihannya. Hal ini selaras dengan pernyataan Ramlan Surbakti (1982), bahwa faktor sakral (agama) menjadi identitas bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu alasan mengapa kelompok agama yang berbeda memiliki gagasan yang berbeda tentang politik adalah karena keyakinan dan praktik agama yang berbeda didasarkan pada keyakinan dasar yang sama. Jadi, misalnya, adanya keragaman agama dalam suatu agama dapat menyebabkan diterimanya ide-ide politik yang berbeda.

Beberapa simbol agama dapat membantu masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Misalnya, parpol kerap menggunakan simbol Kristen, dan beberapa ormas Islam, pendakwah, atau ustadz (pengajar agama Islam) mendukung pasangan calon tertentu. Agama adalah bagian besar dari kehidupan manusia, dan karena itu manusia sering disebut "homo religius". Ini berarti bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan yang sakral, dan ini mempengaruhi kehidupan mereka dalam banyak hal. Misalnya, itu dapat mempengaruhi pilihan politik mereka. Hubungan antara nilai-nilai agama dan perilaku politik merupakan hal yang telah dipelajari oleh sosiolog Max Weber. Dia melihat bagaimana nilai-nilai agama dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, dan dia percaya bahwa inilah mengapa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika, bukan di belahan dunia lain. Agama dipandang telah membantu memperjelas nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, bukannya terlibat dalam aspek tertentu dalam masyarakat. Artinya, agama merupakan salah satu sumber nilai penting yang mendukung budaya politik suatu masyarakat (Sudrajat, 2002).

Ada berbagai cara berpikir dalam Islam, yang dapat dilihat dari bagaimana ajaran agama dipahami. Ada tiga kelompok orang yang berpikir demikian: fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Kelompok fundamentalis percaya bahwa ajaran agama harus diikuti sepenuhnya dan tanpa keraguan. Mereka juga berpendapat bahwa politik dan negara harus

dikendalikan oleh orang-orang yang beragama. Kelompok reformis percaya bahwa agama dan negara harus dipisahkan, tetapi mereka tetap percaya bahwa ajaran agama harus diikuti. Kelompok akomodasionis percaya bahwa agama dan negara harus digabungkan, dan bahwa orang harus mengikuti ajaran agama sesuai keinginan mereka.

Kelompok pertama percaya bahwa Islam penting di dunia modern, dan mereka ingin bekerja sama dengan pemerintah sekuler. Kelompok kedua percaya bahwa Islam harus dikendalikan, tetapi mereka bersedia bekerja sama dengan pemerintah sekuler. Kelompok ketiga percaya bahwa Islam harus diakomodasi dalam kerangka pemerintahan sekuler, dan mereka akan bekerja dengan institusi sekuler. Di bidang politik, kelompok ketiga bersedia melakukan beberapa kompromi untuk mendapatkan jaminan administrasi dan politik yang baik. Perilaku politik mengacu pada tindakan orang-orang di depan pemerintah. Itu dapat menyentuh banyak bidang kehidupan yang berbeda, dan itu sendiri kompleks.

Pengaruh Identitas Keekerabatan terhadap Perilaku Politik Kiai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara politik identitas keekerabatan terhadap perilaku politik kiai, yang dibuktikan dengan hasil olah data statistik variabel politik identitas didapatkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,349 > 1,98525$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel identitas keekerabatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku politik kiai di Kota Sukabumi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Catur Puguh Pamungkas (2015) dengan judul Politik Politik Keekerabatan di Pilkada : Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E-Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa data penelitian menggambarkan hasil analisis politik berpengaruh dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015.

Identitas keekerabatan yaitu identitas yang dilekatkan dengan keekerabatan pada kandidat. Para kiai di kota Sukabumi juga memandang bahwa politik keekerabatan dianggap sebagai salah satu senjata dalam pemenangan kontes demokrasi pemilihan umum, karena figur calon mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menggerakkan masyarakat pemilih agar menggunakan suaranya untuk memilih calon terkait. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,802 dan R Square sebesar 0,642 artinya 64,2%.

Hasil ini berdasarkan jawaban dari 95 orang responden atas 3 pernyataan untuk menganalisis pengaruh identitas keekerabatan (X_2) terhadap perilaku politik kiai (Y), yaitu memberikan pengakuan dan dukungan kepada calon presiden dan caleg berdasarkan keekerabatan dan

mempercayai hanya calon presiden atau caleg yang memiliki kekerabatan yang mampu menerima aspirasi dari masyarakat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Hipotesis kedua diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator identitas kekerabatan (X_2) terhadap perilaku politik kiai (Y) yaitu sebesar 64,2%.

Dinamika politik meniscayakan adanya perubahan dalam dunia pesantren. Perubahan sosial dalam pesantren senantiasa terjadi walaupun tidak sampai mengubah akar substansialnya. Dari sini kemudian timbul teori *change and continuity* (perubahan dan berkesinambungan) dalam menginterpretasi fakta-fakta yang terjadi. Dalam hal yang bersifat *high politic*, bisa dikemukakan adanya justifikasi bahwa politik pesantren merupakan *religious power* dimana keterlibatannya hanya semata untuk kepentingan dakwah dan pencerahan masyarakat tradisional muslim. Jika merujuk pada destinasi ini, maka idealnya pesantren tidak mengalami pergolakan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Pesantren sebagai sarana membangun kekuatan integritas yang memelihara homogenitas dalam bingkai paham *ahlussunnah wal jamaah* senantiasa mampu untuk bertahan dalam semua musim dan cuaca (Dhofier, 1994: 17). Tapi kemudian fakta berbicara lain, munculnya multi partai Islam, seiring dibukanya keran reformasi politik sedikit banyak telah mengakibatkan terjadinya perbedaan bahkan faksionalisme politik di internal NU dan secara khusus antar-pesantren. Bahkan kekuatan pesantren sendiri tidak lagi homogen dan malah sudah sangat heterogen. Ormas tradisional NU juga tidak lagi mempunyai mazhab politik yang tunggal atau monolitik, tapi sudah terdistribusi dalam berbagai mazhab politik yang plural.

Hubungan politik dibangun melalui partai politik dan organisasi sosial. Semua kekuatan dalam organisasi ini digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membuat lebih banyak orang berkuasa dan mengendalikan lebih banyak sumber daya. Jaringan Ulama memiliki banyak kekuatan karena menggunakan saluran yang berbeda untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Kanal-kanal tersebut antara lain tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang memiliki banyak kewenangan dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, kiai memiliki banyak kekuatan ekonomi karena dihormati oleh masyarakat dan memiliki status sosial yang kuat (Mansurnoor, 1990: 187).

Kiai adalah pemimpin agama dengan banyak pengikut. Satu hal yang pasti, mereka selalu berkonsultasi satu sama lain, dan sering mengundang satu sama lain dalam acara-acara seperti perayaan ulang tahun (milad) dan upacara keagamaan. Mereka juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pemimpin lokal dan pengikut mereka. Secara teori, hubungan mereka adalah hubungan patron-klien, tetapi juga dapat dianggap timbal balik karena kiai telah menjadi elit dan para pemimpin mengharapkan dukungan dari mereka.

Pengaruh Identitas Kedaerahan terhadap Perilaku Politik Kiai

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara politik identitas kedaerahan terhadap perilaku politik kiai, yang dibuktikan dengan hasil olah data statistik variabel politik identitas didapatkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,5153 > 1,98525$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel identitas kedaerahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku politik kiai di Kota Sukabumi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aleksander Yandra (2010) dengan judul Politik Politik Etnisitas dalam Pemilukada (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat). Penelitian tersebut menunjukkan Pemilukada di Pasaman menjadikan etnis (kedaerahan) sebagai basis penentuan pasangan kandidat menyebabkan keterpecahan etnis Mandailing dan Minang dalam memberikan dukungan politik memudahkan untuk dimobilisasi, gerakan politik etnisitas menjadi daya dorong dalam mempengaruhi masyarakat.

Identitas kedaerahan atau etnis, yaitu identitas berdasarkan pada latar belakang daerah yang sama dengan calon Presiden atau calon anggota legislatif yang akan dipilih. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat adanya korelasi yang kuat antara identitas kedaerahan dengan perilaku politik meskipun tidak sebesar nilai korelasi identitas agama, nilai korelasi atau hubungan sebesar 0,706, dan besarnya pengaruh identitas daerah terhadap perilaku politik ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 0,492% yaitu sebesar 49,2%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban dari 95 orang responden atas tiga pernyataan untuk menganalisis indikator pengaruh identitas kedaerahan (X_3) terhadap Perilaku politik kiai (Y) yaitu terkait dengan memberikan dukungan kepada calon presiden dan caleg yang berasal dari daerah yang sama dan memberikan dukungan karena kesamaan etnis/suku. Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga diterima, yaitu ada pengaruh indikator identitas kedaerahan (X_3) terhadap Perilaku Politik Kiai (Y), pengaruh yang ditimbulkan yaitu sebesar 49.2%.

Rekapitulasi Pengaruh Indikator Variabel Politik Identitas (X) Terhadap Variabel Perilaku Politik Kiai (Y)

Berdasarkan tabel 1 Rekapitulasi Pengaruh Indikator Variabel Politik Identitas (X) terhadap Variabel Perilaku Politik Kiai (Y) dapat diketahui bahwa perilaku politik kiai di Kota Sukabumi lebih dipengaruhi oleh identitas agama daripada faktor kekerabatan dan kedaerahan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Pengaruh Indikator Variabel Politik Identitas (X)
Terhadap Variabel Perilaku Politik Kiai (Y)

No.	Indikator Variabel X	Besarnya Pengaruh terhadap Variabel Y
1	Identitas agama	66,6%
2	Identitas kekerabatan	64,2%
3	Identitas Kedaerahan / etnis	49,2%

Sumber : diperoleh dari sumber data primer

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan K.H. Fathullah Manshur, Lc yang dikenal dengan nama besarnya, Abah Fatah. Ia selaku Pimpinan Pesantren Tegal Legal Kota Sukabumi dalam wawancaranya menyatakan, bahwa politik identitas agama sangat dominan di Kota Sukabumi, hal ini dikarenakan Kota Sukabumi merupakan kota kecil yang dikelilingi oleh pesantren. Namun menurut beliau politik identitas ini jangan terlalu dibesar-besarkan karena di negara barat pun kecenderungan politik identitas agama sangat kuat dan hal tersebut tidak dianggap sebagai aspek berbahaya.

Hal senada diungkapkan oleh K.H. Aab Abdullah (Ketua MUI Kota Sukabumi), KH. Anas Syakirullah (Ketua PC NU Kota Sukabumi) dan K.H. Ade Rahmatullah (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi), bahwa politik identitas kiai di Kota Sukabumi lebih cenderung kepada identitas keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari Kota Sukabumi yang dikenal dengan sebutan sebagai “Kota Santri”. Selain itu, sejak zaman penjajahan Belanda bahwa keberadaan kiai di Kota Sukabumi merupakan bagian dari ujung tombak perjuangan untuk meraih kemerdekaan di *tatar* Pasundan. Kiai sangat berperan penting, hal ini terbukti dengan dinobatkannya KH. Ahmad Sanusi (Pendiri Pesantren Syamsul Ulum Kota Sukabumi) sebagai Pahlawan Nasional.

Pernyataan dari para responden sesuai dengan pernyataan Syamsi (dalam Agil Nangala, 2019: 78) yang menyatakan bahwa sebagian orang beranggapan bahwa politik identitas adalah hal yang menakutkan dan harus kita hindari karena dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Yang terpenting adalah bersikap adil dan tidak memihak saat menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas.

Politik identitas adalah cara mengatur orang di sekitar kepentingan bersama mereka. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal seperti identitas politik atau identitas sosial, yang menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat untuk menyuarakan suaranya. Politik identitas selalu diperjuangkan karena kelompok orang yang berbeda cenderung memiliki banyak perbedaan, yang dapat menimbulkan konflik (Setyaningrum, 2005: 19).

Pengaruh Secara Simultan Politik Identitas Agama, Keekerabatan dan Kedaerahan Terhadap Perilaku Politik Kiai

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara variabel Politik Identitas agama, kedaerahan dan keekerabatan secara simultan terhadap perilaku politik kiai di Kota Sukabumi menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data statistik diketahui bahwa dimana nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} yaitu sebesar $58,197 > 3,092$ dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi bahwa identitas agama, keekerabatan dan kedaerahan atau etnis jika diuji bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku politik kiai.

Sedangkan dari perhitungan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,898% yang artinya besarnya pengaruh Politik Identitas (agama, keekerabatan dan kedaerahan) memiliki pengaruh terhadap Perilaku Politik Kiai sebesar 89,8%. Adapun sisanya 10,2 % dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar politik identitas (agama, keekerabatan dan kedaerahan).

Politik identitas adalah tentang mencari tahu apa kepentingan kelompok orang tertentu dalam komunitas politik. Identitas politik adalah tentang bagaimana kita mengidentifikasi diri kita secara politis, dan identitas sosial adalah tentang cara sekelompok orang mengidentifikasi satu sama lain (Haboddin dalam Misbahuddin,2022:57). Politik identitas adalah cara berpikir dan memperjuangkan hak-hak orang yang mengidentifikasi diri dengan kelompok atau kategori tertentu. Itu menjadi lebih umum dalam politik, dan itu dapat membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan.

Perilaku politik ditentukan oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat (Sudijono Sastroatmodjo,1995). Pada penelitian ini, teori faktor pembentuk identitas yang digunakan yakni menurut Ramlan Surbakti (1982) bahwa faktor pembentuk identitas mencakup primordial, sakral, personal dan civilitas. Oleh sebab itu perilaku politik kiai di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh identitas calon peserta Pemilu dan berkontribusi positif dalam membentuk perilaku politik kiai pada Pemilu di Kota Sukabumi. Begitu juga tokoh agama di Kota Sukabumi dalam mengekspresikan perilaku politiknya lebih didasarkan pada identitas agama dan keyakinan yang sama daripada faktor keekerabatan dan kedaerahan.

Faktor primordial meliputi hal-hal seperti keluarga, etnis, bahasa, dan kedaerahan. Hal-hal tersebut dapat membentuk perilaku politik seseorang. Faktor sakral didasarkan pada agama yang dianut oleh seseorang. Faktor pribadi didasarkan pada siapa seseorang itu. Ini bisa berupa karakter seseorang atau identitas kelompok masyarakat. Perilaku politik masyarakat didasarkan pada perilaku seorang tokoh yang mereka pandang sebagai panutan.

Sosok panutan dan kharismatik di lingkungan Islam khususnya Sukabumi adalah kiai. Dalam masyarakat, Kiai berfungsi sebagai intelektual organik. Dalam perspektif Antonio Gramsci, setiap intelektual yang perannya terkait dengan produksi dan struktur politik masyarakat disebut sebagai intelektual organik. Kiai dengan moralitas intelektual dan religiusnya mengatur masyarakat melalui ideologi yang ditanamkan sehingga masyarakat secara sukarela mengikuti apa yang dilakukan Kiai. Pengakuan masyarakat terhadap peran keunggulan intelektual dan moral kiai dalam teori disebut justifikasi dan legitimasi. Dikenal sebagai formula politik dalam kaitannya dengan Mosca (Syarif, 2016).

Masyarakat Kota Sukabumi sangat menghormati kiai karena mereka memandangnya sebagai orang yang peduli terhadap komunitasnya dan banyak membantunya. Orang berpikir bahwa menjadi saleh dan berperilaku baik akan memberi Anda keberuntungan dari Tuhan. Masyarakat mengakui pentingnya kecerdasan dan moral kiai dalam teori, dan menyebutnya sebagai pembenaran dan legitimasi. Kiai adalah sosok yang mewakili kepemimpinan religius-karismatik, dan diperlakukan dengan sangat hormat oleh masyarakat. Kiai dipercaya memiliki kesaktian dan kesaktian yang berada di atas kemampuan manusia biasa (Syarif, 2016: 307). Hal ini menunjukkan bahwa sekelompok orang dengan keterampilan kiai yang kuat sangat penting dalam masyarakat adat, karena ketaatan mereka dihargai dan dilindungi. Ini disebut “dominasi yang sah” karena masyarakat dalam situasi ini mampu menguasai dan mendominasi kelompok yang lebih besar karena statusnya didasarkan pada nilai-nilai tradisional. (Syarif, 2016:308 dan S.P. Varma, 1975:231).

KESIMPULAN

Politik identitas kiai di Kota Sukabumi melalui pendekatan keagamaan , ideologi dan keyakinan para pimpinan pesantren dan tokoh masyarakat mudah untuk disentuh. Sehingga masyarakat cepat tanggap dalam setiap bentuk keadaan politik yang terjadi. Politik identitas terkait organisasi keagamaan mencuat saat Pemilu 2019. Pada saat itu, sejumlah pimpinan organisasi keagamaan mengkampanyekan calon pemimpin yang dianggap memihak terhadap umat Islam pada saat itu.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku politik kiai di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh Politik identitas (agama, kekerabatan dan kedaerahan/etnis) serta berkontribusi positif dalam membentuk perilaku politik kiai pada Pemilu di Kota Sukabumi pada tahun 2024
2. Tokoh agama dalam mengekspresikan perilaku politiknya lebih didasarkan identitas agama dan keyakinan yang sama daripada faktor kekerabatan dan kedaerahan. Fakta ini pada akhirnya akan

mempengaruhi cara pimpinan agama memilih calon dan mengajak jamaahnya dalam berpartisipasi politik pada tahun 2024. Hasil penelitian ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana sikap dan perilaku pimpinan agama menjadi dasar dalam menentukan calon pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, S. A. 2014. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chaidir, A., dan Siti, I. 2021. Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1).
- Cherlinda. 2019. *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Skripsi
- Firdaus, Nurul M. 2021, Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *Jurnal Independen; Jurnal Politik Indonesia*. Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2015). *Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Identity Politics and Imaging Governor Candidate to Conduct Voter*. 12(01)
- Hutapea, B. 2015. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Rechtsvinding*, 4(1), 179. <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>
- Irawan, Dede dan Nurmantoro, Aripin Muh. 2022. Kelompok Rentan dan Tantangan Pemilu Inklusif 2024 Studi Kasus Perilaku Pemilih Pada Komunitas Masyarakat Dayak Bumi Segandu Indramayu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 4 No. 1 November 2022. www.journal.kpu.go.id
- Istianah, Ratna. 2022. *Pengaruh Perilaku Pemilih dan Sosialisasi KPU Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Sukabumi*, Tesis.
- Jamal, Nur. 2019. *Hegemoni Kiai dan Blater Dalam Proses Pemenangan Pemilihan Umum*. <https://www.nata.ponpes.id/blog/Hegemoni-Kiai-dan-Blater-Dalam-Proses-Pemenangan-Pemilihan-Umum>.
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma. .
- Maarif, A. S. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Jakarta: Maarif Institute.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.

- Misbahudin. 2022. *Dampak Politik Identitas Terhadap Elektabilitas Calon Kepala Desa Di Desa Layoa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng*. Skripsi
- Mukari, dkk. 2022. Kiai Sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur. *Politeia: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, DOI: 10.21043/politea.v5i1.12671.
- Nanggala Agil, 2019, *Korelasi Politik Identitas Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Di Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia/repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu.
- Nasrudin, Juhana. 2018. *Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)*. Jurnal Hanafiya; Jurnal Studi Agama-Agama. Volume I Nomor 1 Tahun 2018.
- Pamungkas, P. Catur. 2015. *Politik Kekerabatan DI Pilkada : Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015*. Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., dan Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Raden, dkk. 2020. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*.
- Rahman, Taufik. 2020. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rif'an, F. A. 2020. Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 83–100. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8499>
- Rijal, Samsul. 2014. *Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren*. *Tadrīs*. Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, 203-225.
- Setyaningrum, Arie. 2005. *Memetakan Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial*. IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press.
- Sudrajat, A. 2020. Agama dan Perilaku Politik. *Jurnal Humanika*, 1
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafhendry. 2016. *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Alaf Riau.
- Syarif, Z. 2016. *Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura*. Al-Tahrir,
- Umar, Amrullah & Kahar, Suyatno. Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden 2019 (Survey Terhadap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara). 2019. *Jurnal Kawasa* Volume IX Nomor 2 Oktober 2019.

- Wingarta, I Putu Sastra dkk. 2021. Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (The Influence of Identity Politic in Indonesian Democracy). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Yandra, Alexsander. 2010. Politik Etnisitas Dalam Pemilu Kada (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Politik*.